

# ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) Studi Komparatif: Desa Bligo, Kecamatan Candi dan Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

**Agatha Christy Permata Sari**

Email: [christyagathapermata@gmail.com](mailto:christyagathapermata@gmail.com)

**Agus Suman**

Email: [agusuman@ub.ac.id](mailto:agusuman@ub.ac.id)

**David Kaluge**

Email: [davidk@ub.ac.id](mailto:davidk@ub.ac.id)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya

## ABSTRACT

*The phenomenon of slum settlements has been increasingly occurring in Indonesia. President of Indonesia, Joko Widodo having a vision to implement the development program known as Kota Tanpa Kumuh. This program is conducted in more than 100 districts in Indonesia. However, Sidoarjo regency becomes the public spotlight due to its development. Unfortunately, there are two slum villages having different development results. Bligo becomes a successful village in establishing development. Meanwhile, Jiken Village fails in achieving the development. Although two villages have same characteristics and regional regulatory support, it's not sufficient to support the success of development. This research applying qualitative descriptive approach to obtain the importance of participation in development process. It's also important to explain the forms and the factors that influence participation. With applying the Eight Rungs of Citizen Participation, can determine that Bligo village is in citizen control, in which the community plays a full role in program implementation. Contrastingly, Jiken village only in the Informing stage, where the public only get information from the government without any community empowerment. The participation is crucial to the success of the development program. This is due to the existence of self-belonging exerting the ability to create sustainable development achievement*

*Keyword: slum program, citizen participation, participatory development*

## PENDAHULUAN

Fenomena pemukiman kumuh banyak terjadi di berbagai wilayah, khususnya di negara berkembang. Pemukiman kumuh selalu ditandai dengan terlalu banyaknya penduduk yang tinggal di suatu wilayah tanpa memperhatikan esensi kelayakan huni. Kelayakan huni dapat diukur dengan adanya indikator: akses terhadap kebutuhan dasar yang cukup, sanitasi yang memadai, ketersediaan air bersih, ketahanan bangunan, ruang hidup yang memadai, serta jaminan layak huni (Berner,2007). Keberadaan pemukiman kumuh ini tentu berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat baik dari sisi fisik maupun psikologis.

Namun fakta secara umum menunjukkan bahwa penduduk pemukiman kumuh selalu mengalami peningkatan sekitar 10%/tahun. Sehingga penting dilakukan upaya pengentasan pemukiman kumuh.Indonesia merupakan salah satu.

Negara berkembang yang memiliki visi yakni berperan aktif dalam pembangunan daerah guna terciptanya pemerataan kesejahteraan penduduk yang salah satunya diwujudkan dengan adanya kelayakan huni dalam masyarakat.

Indonesia dalam era kepemimpinan Joko Widodo, memiliki 9 Agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita Presiden Jokowi, dimana dalam poin ketiga tercantum: "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan." (Kompas, 2014). Melalui nawacita tersebut, dapat dilihat bahwa pada kepemimpinan Joko Widodo, akan mengusung pembangunan menyeluruh hingga pada perbatasan dan pinggiran. Hal inilah yang kemudian mendasari pembentukan program pemerintah yang dikenal dengan nama Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program KOTAKU merupakan program nasional untuk mencegah dan mengentaskan pemukiman kumuh nasional yang disesuaikan pada

pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015-2019. Pembentukan KOTAKU bertujuan untuk pengentasan pemukiman kumuh di perkotaan hingga pedesaan, meningkatkan kualitas pemukiman, dan meningkatkan akses untuk mendapatkan pelayanan dan infrastruktur yang memadai sehingga tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan. Dimana program KOTAKU telah dilaksanakan di 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada pelaksanaan program KOTAKU yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini dikarenakan, pelaksanaan program KOTAKU di kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu yang memiliki hasil pembangunan paling baik dibandingkan di kawasan lainnya. Sebagai pendukung utama dari ibu kota Jawa Timur, Sidoarjo memiliki peranan yang amat penting. Dimana dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah daerah mendukung dengan dibentuknya Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 58 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk kegiatan Revitalisasi Kawasan Pemukiman Kumuh. Dukungan inilah yang menjadikan Sidoarjo menjadi salah satu kawasan yang berhasil dalam pelaksanaan program KOTAKU dan dijadikan sebagai panutan bagi kawasan lain. Hal ini dibuktikan dengan maraknya peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan di beberapa wilayah kabupaten Sidoarjo. Yang menjadi sorotan yakni pada Tahun 2017, Sidoarjo berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5.55% yang mana lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.33% (Jawa Pos, 2017).

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, yang mana menurut Surat Keputusan Kabupaten, terdapat 11 Desa yang termasuk kategorisasi kawasan kumuh dan membutuhkan program pembangunan KOTAKU. Dari 11 desa yang telah menjalani program pembangunan ini, terdapat salah satu Desa yang menjadi panutan karena progress pembangunan yang sangat baik, yakni Desa Bligo, kecamatan Candi. Namun demikian, juga terdapat desa yang tidak mengalami progress nyata dalam pelaksanaan program KOTAKU sejak awal pelaksanaan, yakni Desa Jiken, kecamatan Tulangan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, mengingat bahwa lokasi dari dua desa yang berdekatan dan di bawah naungan peraturan pemerintah kabupaten yang sama, pelaksanaan program dan waktu pelaksanaan yang sama namun

menghasilkan progress yang berbanding terbalik, dimana desa Bligo mengalami keberhasilan sedangkan desa Jiken mengalami kegagalan dalam menerapkan program pembangunan.

Dengan latar belakang masalah tersebut, menjadi menarik untuk membahas apa yang mempengaruhi perbedaan progress dalam pelaksanaan program pembangunan KOTAKU. Juga akan dibahas secara rinci terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan yang terjadi di Desa Bligo dan Desa Jiken

### **Rumusan masalah**

Apakah yang mempengaruhi perbedaan progress pembangunan antara Desa Bligo dan Desa Jiken dalam program KOTAKU?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pemukiman Kumuh**

Pemukiman kumuh seringkali didefinisikan sebagai pemukiman tidak formal yang ditandai dengan : (1) Status hunian yang tidak aman, (2) Sulitnya akan akses air bersih, (3) akses yang tidak memadai terhadap sanitasi, infrastruktur, dan layanan publik lainnya, (4) Kualitas perumahan yang tak layak/buruk, (5) Terjadi kepadatan yang berlebihan (UN-Habitat, 2003). Pemukiman kumuh banyak terbentuk di pesisir / pinggiran kota besar yang merupakan dampak dari urbanisasi yang berlebihan. Pemukiman kumuh selalu identik dengan kemiskinan di dalam suatu kawasan. Upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu cara untuk menghapuskan *slum area*. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan, dibutuhkan adanya : penggalan potensi yang Sumber Daya yang dimiliki, peningkatan produktivitas kerja, pemberdayaan masyarakat, dan memberikan peminjaman dana untuk modal usaha. (Agus Suman, 2006).

Dalam UU no. 4 pasal 22 tahun 1992 menjelaskan bahwa pemukiman kumuh merupakan kawasan tak layak huni dikarenakan ketidak seimbangan antara tata ruang, kepadatan dan luas bangunan, kondisi lingkungan yang buruk, rendahnya akses akan fasilitas publik, yang mana dapat merugikan atau bahkan membahayakan setiap penduduk yang tinggal di kawasan tersebut.

#### **Pembangunan Partisipatif**

Pembangunan partisipatif merupakan proses pembangunan yang didukung dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program,

hingga keterlibatan dalam evaluasi serta kemampuan masyarakat untuk memiliki inisiatif sesuai otonomi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Cohen dan Uphoff : 1977).

Untuk terciptanya pembangunan partisipatif, dibutuhkan 5 prinsip dasar yang dimiliki oleh masyarakat, yakni : kepercayaan, kesetaraan, demokratis, nyata, dan ketaatan. Dalam Sebuah pembangunan dibutuhkan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga komponen masyarakat, serta adanya kapabilitas yang memadai. (Masniadi dan Kaluge, 2011).

Untuk memahami terciptanya pembangunan partisipatif dalam suatu program pembangunan, setidaknya terdapat 4 tahapan penting. Tahapan pertama adalah **Tahap assessment / ide**, yakni partisipasi yang dilakukan berupa keterlibatan / partisipasi masyarakat dalam melakukan pemetaan permasalahan yang dialami, sumber daya yang dimiliki, dan harapan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Tahap kedua adalah **Tahap perencanaan**, dimana dalam tahapan perencanaan, keterlibatan masyarakat sangat

diperlukan untuk memberikan perencanaan terkait solusi alternatif yang perlu dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan yang telah dipetakan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yakni **Tahap pelaksanaan dan pengawasan**, Pada tahap ketiga, partisipasi masyarakat dapat dilihat ketika adanya keterlibatan secara aktif berupa tindakan nyata pada proses pelaksanaan program. Dan pada tahap terakhir ialah **Tahap evaluasi**, yakni. partisipasi masyarakat yang dapat diukur dari penilaian akan pelaksanaan program, pemberian saran kritis dan persiapan untuk tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

#### Tahapan Partisipasi (Model Arnstein)

Untuk mengukur tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan, dibutuhkan adanya indikator. Dalam penelitian ini menggunakan *Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation* oleh Arnstein. Dimana terdapat 8 tahapan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari partisipasi yang paling tinggi hingga tahapan yang paling rendah.



Gambar 1

#### *Arnstein Ladder of Public Participation*

Sumber: Arnstein, Sherry R. 1969. *A Ladder of Citizenship Participation*. Journal of the American Planning Association, 35:4, 216-224

Arnstein membagi tahapan partisipasi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama ialah **Degrees of Citizen Power** dimana merupakan tahapan partisipasi masyarakat yang paling tinggi. Tahap pertama yakni **Citizen Control**, dimana Masyarakat berpartisipasi sepenuhnya dalam keseluruhan pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan bahkan bantuan dana. Tahap kedua yakni **Delegated Power**, pada tahapan ini masyarakat berpartisipasi untuk membentuk keputusan tertentu dalam penyelesaian masalah. Tahapan ketiga yakni **Partnership**, yaitu Masyarakat memiliki kekuasaan untuk berunding

dengan pihak pelaksana dalam pengambilan keputusan

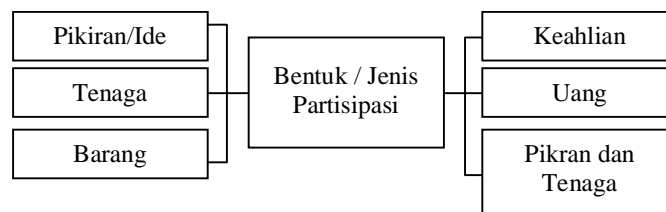
Kelompok kedua yakni **Degrees of Tokenism** dimana merupakan tahapan partisipasi menengah yang hanya memberdayakan sedikit partisipasi dari masyarakat. Terdapat 3 tahapan yang termasuk pada kelompok ini, antara lain: **Placation**, merupakan tahap bahwa pihak pemerintah memiliki kekuasaan untuk menunjuk perwakilan dari masyarakat kemudian memiliki akses pada pengambilan keputusan. Dilanjutkan dengan tahap **Consultation**, Partisipasi masyarakat dilakukan melalui *public hearing*. Melalui pendapat tersebut dijadikan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan. Selanjutnya adalah tahapan **Informing**, dimana Pihak pemerintah hanya memberikan informasi pada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini, masyarakat mulai tidak diberdayakan

Kelompok ketiga yakni **No Power**. Dalam kelompok ini, masyarakat tidak memiliki kedaulatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Yang termasuk dalam tahapan ini adalah Tahapan **Therapy**, tahapan yang mana pemerintah berpura-pura melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat sesuai dengan kepentingan pemerintah. Dan

Tahapan paling bawah dalam partisipasi, adalah Tahap **Manipulation**, pada tahapan ini, masyarakat tidak melakukan partisipasi sama sekali. Kegiatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik, sekalipun kondisi tidak sesuai dengan faktanya.

Selain menilai tahapan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, juga penting untuk mengetahui apa saja bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat guna mendukung tercapainya pembangunan tersebut. Berikut ini merupakan beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan:



**Gambar 2**  
**Bentuk-Bentuk Partisipasi**

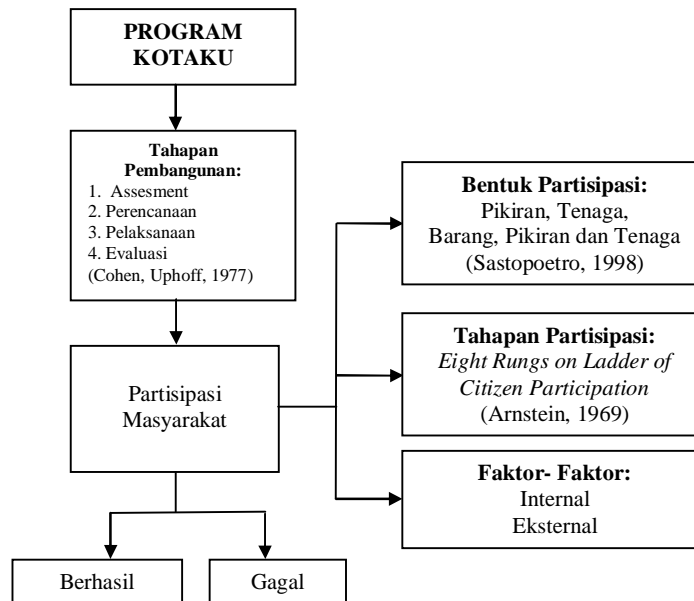
Sumber: Sastopoetro, R, S. (1988) Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam

Adanya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Tingkatan partisipasi, dan juga bentuk partisipasi yang dilakukan tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi, dibutuhkan pengamatan secara langsung di Desa Bligo dan Desa Jiken

### **Kerangka Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, dapat digunakan alur pikir penelitian

. Melalui Alur Kerangka Pikir, dibentuk preposisi bahwa adanya perbedaan hasil pembangunan antara Desa Bligo dan Desa Jiken dalam pelaksanaan program KOTAKU dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya implementasi partisipasi masyarakat yang membentuk pembangunan partisipatif. Dengan adanya pembangunan partisipatif, kemudian secara mandiri akan menciptakan adanya pembangunan berkelanjutan. Berikut ini merupakan alur kerangka pikir yang dibentuk:



**Gambar 3**  
**Alur Kerangka Penelitian**

Sumber: Penulis

## METODE PENELITIAN

Model penelitian menggunakan pendekatan deskriptif -kualitatif dengan acuan oleh Miles dan Hubberman (1984), yang menyatakan bahwa analisis dilakukan secara intensif, komunikatif dan diperlukan mendapatkan informasi dengan

melakukan studi lapang guna memahami secara langsung pelaksanaan program pembangunan dari masing-masing desa baik desa Bligo maupun desa Jiken. Akifitas yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

**Tabel 1**  
**Metode Penelitian**

	<b>Deskriptif-Kualitatif</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	Pelaksanaan Program KOTAKU di Desa Bligo dan Desa Jiken Tahun 2015-2018
<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	Data Primer (Studi Lapang) melalui: Dokumentasi, Observasi lapang, Wawancara secara langsung ( <i>Snowball Sampling</i> ): a. Pemerintah Desa b. Tokoh Masyarakat c. Pelaksana Program d. Masyarakat
<b>Teknik Analisis Data</b>	Reduksi Data, penyajian data, penarikan kesimpulan.
<b>Metode Analisis</b>	Metode Evaluasi menggunakan analisis kualitatif-deskriptif

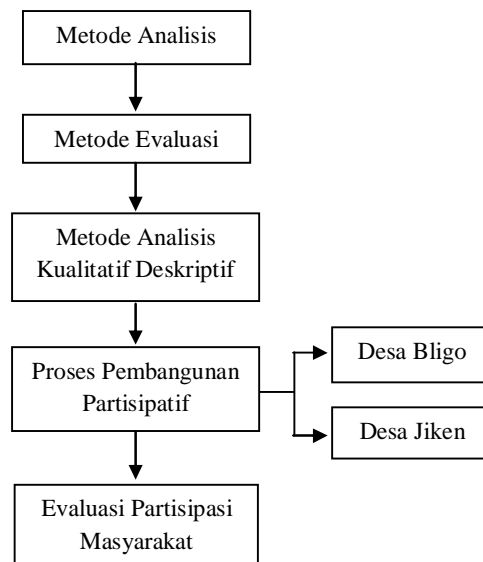
Sumber : Olahan Penulis

Sebagai pendukung dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pendukung sebagai berikut ini:

**Tabel 2**  
**Data Penelitian**

No	Data	Data yang dibutuhkan	Sifat Data
1.	Jumlah dan Keterangan RT/RW dari masing masing desa : a. Desa Bligo b. Desa Jiken	Kebijakan dan peraturan daerah	Kuantitatif
2.	Penggunaan Lahan	Luas lahan pengelolaan lahan	Kuantitatif
3.	Batas Administrasi Wilayah (Peta Wilayah)	Batas-batas wilayah adminisitrasi desa	Kualitatif
4.	Data Penduduk di masing-masing desa	Jumlah penduduk, data sex ratio, pekerjaan dan umur	Kuantitatif
5.	Jenis Kegiatan perencanaan Partisipatif di masing-masing desa.	Daftar kehadiran dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan	Kualitatif
6.	Data proses perencanaan partisipatif di masing-masing desa.	Data persiapan proses perencanaan (sosialisasi) Data sejak pengambilan keputusan hingga evaluasi	Kualitatif

Sumber : Olahan Penulis



**Gambar 4**

**Kerangka Analisis**

Sumber : Olahan Penulis

**PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum**

Program KOTAKU merupakan suatu program pembangunan guna mencegah dan mengentaskan kawasan pemukiman kumuh. Pelaksanaan ini didasarkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015 -2019 dan berdasar pada Agenda Utama Kepemimpinan era Joko Widodo (Tahun 2014-2019) yang berisikan “*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*”. Tujuan pelaksanaan pembangunan ini adalah tercapainya pengentasan hingga 0% pemukiman kumuh dengan melaksanakan aktifitas pembangunan. Untuk menentukan bahwa suatu kawasan tergolong

kawasan kumuh, terdapat 7 indikator utama, antara lain: Permasalahan rumah tak layak huni, Minimnya akses jaringan jalan, Drainase lingkungan tidak memadai, Permasalahan akses air minum, Akses sanitasi yang minim, Pengelolaan sampah dan lingkungan yang buruk, Kurangnya sistem proteksi akan bahaya kebakaran.

Dalam penelitian ini fokus yang dibahas adalah pelaksanaan program KOTAKU di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan studi kasus di Kabupaten sidoarjo dikarenakan Sejak diberlakukannya program KOTAKU, Kabupaten Sidoarjo berhasil mendapatkan perhatian publik. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kabupaten Sidoarjo didukung oleh Peraturan Bupati no. 58 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan

Khusus Desa untuk Kegiatan Revitausasi Kawasan Pemukiman Kumuh. Kebijakan ini sangat mendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan tercapainya pertumbuhan ekonomi hingga 5.5%.

Salah satu pendorong keberhasilan program KOTAKU adalah program pembangunan yang terjadi di Desa Bligo. Desa Bligo merupakan salah satu dari 11 desa yang dijadikan sebagai

percontohan karena keberhasilannya dalam pelaksanaan program KOTAKU. Namun demikian, juga terdapat desa yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program KOTAKU, yakni Desa Jiken. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya tujuan yang telah direncanakan, dan pembangunan yang dilakukan hanya sebageian dan berfokus pada pembangunan fisik saja. Berikut ini merupakan gambaran umum dari Desa Bligo dan Desa Jiken:

**Tabel 3**  
**Gambaran Umum Desa Bligo dan Desa Jiken**

No	Gambaran Umum	Desa Bligo, Kecamatan Candi	Desa Jiken, Kecamatan Tulangan
1.	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk	Luas : 8,00 Ha Jml : 5.825 Pria : 2.900 Wanita: 2.925 Jmlah RW : 8	Luas : 2.9 Ha Jml : 2177 Pria : 1.188 Wanita: 989 Jml. RW : 3
2.	Pendidikan Terakhir	SMA: 1.453 jiwa	SMP: 257 Jiwa
3.	Mata Pencaharian	Pegawai Swasta: 1191	Wiraswasta: 830
4.	Sarana dan Prasarana	Pendidikan, Kesehatan, Tempat Ibadah, Saluran air, Transportasi	Transportasi Pendidikan Kesehatan Olahraga Saluran air
5.	Kelembagaan yang aktif	Kepala Desa, Perangkat desa, Lembaga Masyarakat : 1. LPMD 2. PKK 3. Karang Wreda 4. Karang Taruna 5. RT/ RW	Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat: 1.LPMD 2.PKK 3.Karang Taruna 4.RT / RW

Sumber : Sekretariat Desa Bligo dan Desa Jiken

Dalam Pelaksanaan program KOTAKU di masing-masing desa, terdapat beberapa konsep dan strategi penanganan di Daerah Kumuh, dimana

secara umum, Konsep dan Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Permasalahan Umum, Konsep, dan Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Dalam Program KOTAKU**

No	Masalah Kawasan Kumuh	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan
1	Banjir dan banyak genangan Air	Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan layanan drainase baik secara kualitas dan kuantitas.	pengembangan sistem drainase pemukiman, pembangunan jaringan drainase yang terhubung dengan kota .
2	Gedung dan Jalan Rusak	pengawasan dan pengendalian, meningkatkan dengan melaksanakan pemugaran / rehabilitasi.	adanya perbaikan / pembangunan jalan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan.
3	Sampah dan Air Limbah	Sosialisasi akan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PBHS), Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah, Rekonstruksi dan pemugaran, dan Penyediaan daran pengelolaan sampah	Penyediaan (IPAL) komunal dan sistem penyaluran terpusat. Perbaikan sarana dan prasarana MCK, Pembangunan Tempat Penampungan dan pengolahan sampah.
4	Akses Air bersih	Pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan air, Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih (PDAM).	Penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
5	Sistem Proteksi Kebakaran	Menerapkan sistem proteksi kebakaran, pembangunan pemberdayaan sumber air terbuka.	Pengembangan strategi sistem proteksi kebakaran, penyediaan sarana dan prasarana sistem proteksi, seperti: Hydrant, APAR / Mini Damkar.

6	Adanya RTH dalam lingkungan pemukiman	Pemberdayaan masyarakat, pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah pemukiman warga	Pembangunan RTH di beberapa wilayah pemukiman warga.
---	---------------------------------------	--	--

Sumber: Program KOTAKU

### Pentingnya Partisipasi dalam Proses Pembangunan

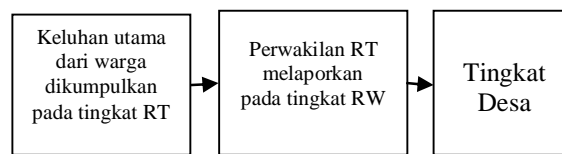
Desa Bligo merupakan desa yang menjadi panutan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Sidoarjo. Hal ini didukung oleh adanya partisipasi dalam keseluruhan proses program KOTAKU

#### 1. Tahap Assesmen

Dalam memetakan permasalahan utama, masyarakat berperan aktif dan berpartisipasi.

Menurut Kepala Desa Bligo, bentuk partisipasi yang dilakukan adalah melakukan pemetaan permasalahan yang berasal dari keluhan masing-masing masyarakat yang difasilitasi:

Adanya fasilitas sebagai sarana aspirasi dari masyarakat, kegiatan ini menciptakan pemetaan permasalahan sesuai, tepat dan faktual. Sehingga diperoleh pemetaan sebagai berikut ini:



Gambar 5

### Proses Pemetaan Permasalahan Yang Dihadapi Desa Bligo

Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Bligo: Adi Suwandono, 2018

Tabel 5  
Pemetaan Tahapan Assesmen Desa Bligo

No.	Permasalahan	SD yang dimiliki	Harapan yang ingin dicapai
1	Limbah Kulit Kerang di Bantaran Sungai	Sosialisasi dan Pelatihan daur ulang sampah	Kawasan bantaran bebas sampah, dan peningkatan ekonomi masyarakat
2	Banjir akibat saluran drainase tersumbat	Pembangunan drainase melalui tenaga ahli program KOTAKU	Tidak terjadi banjir dan genangan
3	Sampah yang berserakan dan kebakaran akibat pembakaran sampah liar	Lahan yang luas yang memungkinkan pembangunan TPA dan Tempat pembakaran sampah.	Tidak adanya sampah yang berserakan, dan minim terjadinya kebakaran
4	Minimnya Akses akan air Bersih	Lokasi Desa yang strategis (dekat Kota).	Kemudahan akses akan air bersih
5	Minimnya RTH	Kepemilikan teras di masing-masing rumah warga, dan lahan desa yang masih luas.	Terciptanya kawasan Hijau di setiap rumah.

Sumber : Olahan Penulis

#### 2. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dibutuhkan untuk menemukan perencanaan alternative yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Untuk Permasalahan Kulit Kerang dapat diselesaikan dengan kerja bakti warga, mengumpulkan kulit kerang, mengadakan pelatihan untuk daur ulang kulit kerang menjadi kerajinan oleh sosialisasi dari Tokoh Masyarakat (Sumargono, 2018).

Untuk permasalahan pembersihan saluran melalui kerja bakti bergantian dari tiap RW, perbaikan saluran drainase, adanya dukungan kemudahan ijin pembangunan Sedangkan

untuk permasalahan sampah dan Kebakaran dengan pemberian sampah terpisah (organik dan anorganik), penyediaan TPA, peningkatan ketersediaan damkar, dan *hydrant*.

Selanjutnya untuk permasalahan air bersih ditangani dengan memudahkan akses masuk PLN, pembangunan fasilitas MCK, dan sosialisasi penggunaan air yang baik. Dan untuk permasalahan RTH ditangani dengan penanaman tanaman hijau di 10% lahan, tanaman toga, lomba kebersihan antar RW.

**“Warga Desa Bligo memang terkenal guyub rukun, kumpul untuk membicarakan**



*kemajuan desa sudah jadi keseharian dari warga disini. Warga juga dikenal sebagai warga yang kritis dan selalu memiliki ide yang membangun". (Sumargono, 2018)*

3. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan  
Pada tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi warga desa Bligo antara lain:

**Tabel 6**  
**Jenis Kegiatan Partisipatif Warga Desa Bligo Dalam KOTAKU**

No.	Kegiatan Partisipatif	Pelaksana
1	Kerja Bakti tiap RT secara rutin (Kulit kerang, sampah, dan saluran drainase).	Seluruh Warga (RW 01-08) Karang Taruna, PKK.
2	Sosialisai dan Pelatihan daur ulang sampah kulit Kerang.	Tokoh Masyarakat (Pak Sumargono), Pelaksana Program KOTAKU, Karang Taruna.
3	Musyawarah terkait pelaksanaan program secara rutin.	Pemerintah desa, Perwakilan warga, Tokoh masyarakat.
4	Menjalankan program Bank Sampah dan pemilahan sampah.	Seluruh warga Desa Bligo, pemerintah desa.
5	Diadakan lomba kawasan bersih (RW) dan kewajiban penanaman tanaman hijau.	Seluruh warga Desa Bligo.

Sumber : Olahan Penulis

#### 4. Evaluasi

Permasalahan utama yang dialami oleh warga desa Bligo telah teratasi dengan adanya program pembangunan KOTAKU baik dalam bantuan teknis maupun bantuan dana yang mendukung perbaikan dan pembangunan pada aspek-aspek tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, warga desa Bligo sangat antusias dengan adanya program KOTAKU. Adanya peran aktif dari warga sangat membantu pelaksana program KOTAKU. Warga sangat mendukung adanya pelaksanaan program kotaku.

*“Dengan adanya Program KOTAKU bisa mewujudkan keinginan warga desa Bligo untuk melakukan pembangunan. Selama ini telah banyak rencana yang dipersiapkan, akan tetapi terhambat karena kekurangan dana.” (Anang Wahyudi,2018).*

*“Program KOTAKU yang telah dilaksanakan di Desa Bligo ini sangat sukses. Banyak perubahan positif yang dirasakan bagi warga desa, bukan hanya pembangunan secara infrastruktur saja, melainkan juga pembangunan sumber daya dari masing-*

*masing warga dan juga meningkatkan rasa kepemilikan warga akan pentingnya pembangunan yang terus-menerus”. (Sri Rosdiana, 2018)*

Dari hasil pemaparan tersebut, dapat ditentukan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh warga Desa Bligo masuk pada **tahapan Citizen Control** (pengawasan masyarakat) yakni masyarakat terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah : pikiran, tenaga, keahlian, dan uang.

Desa Jiken merupakan desa yang yang gagal dalam pelaksanaan program KOTAKU di Sidoarjo. Hal ini didukung oleh kurangnya partisipasi dalam keseluruhan proses program KOTAKU

##### a. Tahap Assesmen

Dari pihak kepala desa menyebutkan bahwa penentuan permasalahan yang dialami di desa Jiken dibentuk sesuai pengamatan khususnya di kawasan RW 03. Melalui pengamatan dari pihak pelaksana yang kemudian didiskusikan dengan beberapa pihak pemerintah desa atau pihak yang berpean. Hasil pada tahapan assesmen di Desa Jiken, adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Pemetaan Tahapan Assesmen Desa Bligo**

No.	Permasalahan	SD yang dimiliki	Harapan yang ingin dicapai
1	Buruknya sistem drainase akibat sampah, dan menyebabkan banjir	Dana dari program KOTAKU untuk pembangunan kualitas dan kuantitas drainase.	Terciptanya sistem saluran drainase yang baik.
2	Banyaknya warga yang beternak di lahan rumah, sehingga mengakibatkan bau tak sedap.	Adanya lahan kosong untuk pengalihan peternakan warga secara komunal.	Terciptanya Lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan kondusif.
3	Sampah yang berserakan dan kebakaran akibat pembakaran sampah liar	Masih adanya lahan guna dijadikan TPA dan pembakaran sampah, sampah yang ditemui merupakan sampah yang masih aman lingkungan.	Terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman dan tidak terjadi kebakaran
4	Pembuangan limbah RT langsung ke sungai	Adanya upaya pembangunan fasilitas MCK komunal dari pihak pemerintah desa.	Terciptanya sungai yang bersih dan tidak tercemar sehingga dapat dimaksimalkan fungsi kegunaannya.
5	Minimnya RTH	Masing-masing rumah warga memiliki lahan untuk penanaman tanaman hijau, dan adanya lahan untuk pembentukan taman.	Terciptanya Desa Jiken yang asri dan sejuk

Sumber : Olahan Penulis

***“Warga Desa Jiken itu seringkali hanya mengikuti arus dan menurut pada semua keputusan dari pemerintah desa. Mayoritas penduduk beranggapan bahwa pihak aparat desa dan pemerintah mampu mengerti dan mengatasi segala permasalahan lingkungan di desa ini. Sehingga setiap keputusan yang didapatkan berupa keputusan pemerintah baik pusat maupun desa.” (Sutomo,2018)***

Pengambilan keputusan dalam upaya untuk memetakan permasalahan yang dihadapi, dilakukan per-semester sejak awal dilaksanakannya program. Kurangnya koordinasi antar pihak pemerintah desa dan juga pihak pelaksana sering kali mengakibatkan salah paham antara pihak pemerintah dan desa.

b. Tahap Perencanaan

Hal terpenting yang menjadi sorotan pada tahap perencanaan adalah menentukan solusi berupa solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan. Hasil dari tahap perencanan di Desa Jiken yaitu: untuk permasalahan drainase adalah dengan pembangunan drainase secara kualitas dan kuantitas, pembersihan sampah-sampah, dan sosialisasi kebersihan, selanjutnya untuk permasalahan peternakan warga adalah dengan pengalihan peternakan warga ke lahan peternakan komunal, dan sosialisasi cara beternak yang benar.

Permasalahan yang sangat disoroti yakni sampah yang berserakan, dan kebakaran dapat diatasi dengan pemisahan sampah organik dan anorganik, peneanaan sanksi membuang sampah sembarangan dan penyediaan TPA. Sedangkan untuk permasalahan pembuangan limbah langsung ke sungai adalah dengan pembangunan fasilitas MCK umum. Dan untuk permasalahan minimnya RTH adalah dengan melakukan reboisasi dan pembangunan taman desa.

***“Perencanaan pembangunan yang dibentuk merupakan pengamatan dari pihak pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan dari warga Desa Jiken. Tapi yang terpenting adalah membangun rasa kepercayaan dari masyarakat akan program pembangunan KOTAKU. Seringkali yang terjadi adalah program berhenti di tengah jalan. Sehingga tidak menciptakan kondisi yang semakin kondusif, akan tetapi justru amburadul” (Tri Wahyono,2018)***

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa adanya sikap pasif dan minimnya dukungan dari warga desa jiken dipengaruhi oleh kekecewaan pada beberapa program pembangunan sebelumnya yang tidak pernah dilakukan secara tuntas. Oleh karena itu sangat

menghambat partisipasi masyarakat pada c. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan pelaksanaan program.

**Tabel 8**  
**Jenis Kegiatan Pelaksanaan di Desa Jiken**

No.	Kegiatan Partisipatif	Pelaksana
1	Pembangunan saluran drainase	Tenaga Ahli (program KOTAKU)
2	Pengalihan Peternakan warga ke lahan yang disediakan	Seluruh warga RW 01-03
3	Pembentukan, pemilahan sampah organik dan anorganik dan pembangunan TPA dan pembakaran sampah	Seluruh RW 03 Pemerintah Desa Pelaksana Program KOTAKU
4	Pembangunan Fasilitas MCK umum	Pelaksana Program KOTAKU Sebagian warga desa Jiken
5	Pembangunan taman hijau dan reboisasi	Pelaksana Program KOTAKU Pemerintah desa Sebagian warga Jiken

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan jenis-jenis kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa Jiken dapat dilihat bahwa yang berperan aktif adalah pemerintah desa, pelaksana program dan sebagian warga dari RW 03 saja.

*“Desa Jiken ini meskipun kawasannya tidak terlalu luas, tapi memang kurang rukun satu sama lain. Kepedulian masyarakat untuk lingkungan tempat tinggal masih sangat sedikit. Apalagi kawasan kumuh hanya di RW 03, mengakibatkan pemikiran dari warga RW 01 dan RW 02 beranggapan kondisi kumuh justru diciptakan oleh warga RW 03.” (Endah Wigati, 2018).*

Rendahnya inisiatif warga desa Jiken, dikarenakan memang adanya perbedaan yang sangat kontras di wilayah RW 01 – 02 dengan di RW 03. Dimana kawasan kumuh banyak terjadi di RW 03 dan kurangnya kerukunan antar warga mengakibatkan adanya kesenjangan sosial.

*“Program pembangunan di Desa Jiken sangat membutuhkan kepedulian dari warga desa sendiri, terutama dalam pengelolaan sampah. Dari program pemerintah telah berhasil melakukan pembangunan berupa TPA, dan Pembagian sampah organik dan anorganik. Namun masih tingginya budaya membuang sampah sembarangan mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan program pengelolaan sampah, selain sampah masih saja berserakan, juga kondisi tersumbatnya saluran drainase oleh sampah terjadi secara terus menerus ” (Ratna Ayu, 2018).*

Kurangnya kesadaran dari warga untuk turut mendukung pembangunan juga sangat dirasakan oleh pelaksana program KOTAKU. Banyak nya perencanaan yang tidak berhasil justru menghabiskan banyak biaya namun tidak berdampak banyak pada pembangunan di desa Jiken.

*“Program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui program KOTAKU terlalu fokus pada pembangunan jalan dan gedung-gedung fisik saja, tetapi tidak bisa menyelesaikan penyebab utama dari munculnya kondisi kumuh di Desa Jiken ” (Endah Wigati, 2018)*

Adanya ketidaksepahaman antara warga dan pemerintah mengakibatkan hambatan besar dari koordinasi pelaksanaan. Dari penelitian ini ditemukan adanya unsur saling menyalahkan antara pihak pemerintah dan masyarakat mengakibatkan sulit tercapainya pembangunan partisipatif dan tidak mungkin terciptanya pembangunan berkelanjutan.

#### d. Tahap Evaluasi

Desa Jiken telah mengikuti program KOTAKU sejak tahun 2015, Namun demikian progress yang didapatkan oleh desa Jiken hanya pada sampai tahap pembangunan fisik saja, dan tidak ada pemberdayaan warga di dalamnya. Sehingga adanya program KOTAKU di Desa Jiken, dinyatakan tidak berdampak / gagal.

Adanya ketidak sepahaman antara pemerintah dan masyarakat menjadikan terhambatnya pelaksanaan pembangunan partisipatif. Dari pihak pemerintah menganggap bahwa kurangnya kepedulian dari masyarakat

dikarenakan adanya kebiasaan taat pada seluruh kebijakan dari pemerintah, warga yang sangat pasif, dan terlalu mengikut arus. Sehingga pemerintah mengambil segala keputusan melalui proses pengamatan saja. Namun dari pihak masyarakat kondisi tidak terjadinya partisipasi muncul karena ketidakpercayaan warga desa Jiken terhadap pelaksanaan program pembangunan akibat permasalahan historis yang kemudian membentuk ketidakpedulian dari warga akan adanya program pembangunan desa.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa bentuk partisipasi masyarakat desa Jiken masuk pada tahapan **Information (informasi)**, pada tahapan ini Pihak pemerintah (pemegang kekuasaan) hanya memberikan informasi pada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan. Bentuk partisipasi yang dilakukan adalah : tenaga (warga RW 03).

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Adanya perbedaan hasil pembangunan dalam pelaksanaan program KOTAKU, dipengaruhi oleh perbedaan partisipasi warga dalam pelaksanaannya. Faktor yang mendukung Partisipasi di Desa Bligo (berhasil) antara lain: Kesiapan warga dalam program pembangunan KOTAKU, Sehingga tidak diperlukan sosialisasi yang rumit, Persebaran kondisi kumuh yang merata dari RW 01 hingga RW 08, yang menyebabkan rasa senasib dan memunculkan upaya pembangunan, Aktifnya lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat yang berkontribusi penuh dalam pelaksanaan program pembangunan, Kualitas SDM dan Keahlian yang sangat mendukung jalannya program pembangunan, dan Letak Geografis Desa Bligo yang dekat dengan Kota, sehingga memudahkan akses saluran drainase dan air bersih.

Namun demikian, Lain halnya dengan yang dialami Desa, dimana kegagalan pelaksanaan pembangunan dipengaruhi oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Faktor yang menghambat Partisipasi di Desa Jiken (gagal) yaitu: Adanya Permasalahan historis berupa kekecewaan akan program pembangunan di Desa Jiken yang tidak tuntas, Kondisi kumuh yang hanya terpusat di kawasan RW 03, yang mengakibatkan keacuhan dari warga RW 01 dan RW 02, Kurangnya peranan lembaga masyarakat, perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menggerakkan partisipasi warga

desa Jiken, Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Jiken, yang tidak berkontribusi banyak pada pelaksanaan program pembangunan, dan Letak geografis Desa Jiken yang jauh dari kota sidoarjo menyebabkan susah terhubungnya saluran drainase dan sistem air bersih terpusat menuju kota.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu program pembangunan yang memiliki tujuan untuk mengentaskan pemukiman kumuh hingga 0%. Salah satu wilayah yang mendapatkan apresiasi publik dalam pelaksanaan program pembangunan KOTAKU adalah Kabupaten Sidoarjo, karena adanya satu wilayah yang memiliki progress yang baik. Dari 11 Desa yang mengikuti program KOTAKU, Desa Bligo merupakan desa yang memiliki progress paling baik. Keberhasilan desa Bligo dipengaruhi oleh partisipasi warga yang memasuki tahapan **citizen control**, yakni masyarakat berperan sepenuhnya pada pengambilan keputusan dalam program pembangunan. Bentuk partisipasi yang dilakukan warga desa bligo berupa: pikiran, tenaga, keahlian dan uang. Adanya *self of belonging* dari warga dipengaruhi oleh faktor: kesiapan warga dalam pelaksanaan program, kondisi kumuh yang merata dari RW 01-RW 08, aktifnya lembaga kemasyarakatan, SDM yang berkualitas, dan letak geografis desa Bligo yang berdekatan dengan kota.

Sangat kontras kondisi yang terjadi di Desa Jiken, yang merupakan salah satu desa yang gagal menerapkan pembangunan melalui program KOTAKU. Pembangunan yang terjadi di desa ini hanya pembangunan fisik, berupa pembangunan infrastruktur yang didominasi oleh peranan pemerintah. Partisipasi warga desa Jiken termasuk pada tahapan **informing**, dimana pihak pemerintah hanya memberikan informasi pada masyarakat tanpa memberdayakan partisipasi masyarakat. Kegagalan pembangunan terjadi karna kurangnya partisipasi warga yang hanya dilakukan dalam bentuk tenaga saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya partisipasi warga desa Jiken antara lain: Adanya permasalahan historis akan program pembangunan, kondisi kumuh terpusat di RW 0, kurangnya peranan lembaga dan perwakilan masyarakat, serta tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi warga, rendahnya kualitas SDM, dan letak geografis desa yang jauh dari pusat kota.

Sehingga dapat dibentuk kesimpulan bahwa penting peranan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program pembangunan KOTAKU di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan tidak hanya berupa pembangunan fisik namun tercipta pembangunan berkelanjutan yang secara mandiri dilakukan oleh warga.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, dibentuk beberapa saran sebagai berikut ini:

#### a. Bagi Pemerintah

Disarankan bagi pemerintah untuk selalu melaksanakan program pembangunan secara tuntas, sehingga memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk pelaksanaan program selanjutnya, Penting untuk diadakan sosialisasi sehingga masyarakat memahami jalannya pelaksanaan program pembangunan, dan kewajiban memberdayakan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang berhasil dan tepat sasaran.

#### b. Bagi Masyarakat

Disarankan bagi masyarakat untuk berperan aktif pada pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan mendukung terciptanya pembangunan sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat itu sendiri dan terlebih dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan, karena masyarakat memahami dan memiliki *self of belonging* atas wilayah tempat tinggalnya.

#### c. Bagi Akademisi

Disarankan bagi Akademisi untuk lebih menekankan penerapan pemberdayaan masyarakat dalam program penanganan, dan diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendetail terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat secara umum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. (1969). *A Ladder of Citizenship Participation*. Journal of the American Planning Association, 35:4, 216-224.
- Arsyad, A. (2002). *Media Pembelajaran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bryan, Carolie dan Lous g. White. (1987). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta : LP3ES.
- Berner, E. (2007). *Of slums and gated communities: Failure of formal and informal land markets in developing cities*. Paper presented at the ISS/ Development and Change Symposium 'Cities of Extremes', The Hague, 15th – 16th October 2007.
- Cohen and Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. New York : Cornel University.
- Conyers, Diana. (1991). *An Introduction to Social Planning in The Third World*, terjemahan Susetiwawan, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Caldeira, T P R. (1996). *Building up Walls: The New Pattern of Spatial Segregation in Sao Paulo*. UNESCO, hlm: 55–66.
- Crosby, B.L. (1992). *Stakeholder Analysis: A vital tool for strategic managers*. Technical Notes, No. 2. Agency for International Development, Washington DC.
- Friedman. (2005). *The World is Flat : A Brief History of The Twenty-First Century*.
- Godehart, S., and Vaughan, A. (2008) *Research Reviewing the BNG in Relation to Upgrading Informal Settlements*. Research Paper for Theme 1: Conceptual Framework. For the National Department of Housing. hlm:8-10.
- Goswami, Sribas, dkk. *Urban Poor Living in Slums: A Case Study of Raipur City in India*. Volume 13 . Issue 4 version 1.0 Tahun 2013. Global Journals Inc. Diakses melalui (online) [https://globaljournals.org/GJHSS\\_Volume13/3-Urban-Poor-Living-in-Slums-A-Case-Study.pdf](https://globaljournals.org/GJHSS_Volume13/3-Urban-Poor-Living-in-Slums-A-Case-Study.pdf) pada Februari 2018.
- K. Das, Ashok. (2015). *The Contribution of Participation to Slum Upgrading: Comparing Indian and Indonesian Cases*. Invited Paper: Department of Urban Studies and Planning College of Behavioral and Social Science San Fransisco State University
- Listya. (2011). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi*. Diakses melalui (online) <http://mmt.its.ac.id/publikasi/?p=2670> pada Februari 2018.
- MacPherson, Laura. *Participatory Approaches to Slum Upgrading and Poverty Reduction in African Cities*. Volume 1 tahun 2013. Diakses melalui (online) <http://journals.ed.ac.uk/hydra/article/view/198/> pada februari 2018.
- Masrun, Laode. (2009). *Fenomena Perkampungan Kumuh di Tengah Perkotaan : Hasil Identifikasi Karakteristik Pemukiman Kumuh di Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo*

- Kota Surabaya. Diakses melalui (online)  
<https://www.academia.edu/Download> pada  
Maret 2018.
- Masniadi, David Kaluge. (2011). *Implementasi Kebijakan Fiskal: Pembiayaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) di Kabupaten Sumbawa Barat.* Diakses melalui online  
<http://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/115> pada juli 2018.
- Milles, M.B and Hubberman. (1984). *Qualitative Data Analysis.* London : Sage Publication. Hlm : 117-118.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, cetak 5. Hlm : 12.
- Sastopoetro, R. S. (1988) *Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan.* Bandung: Alumni.
- Suman, Agus.(2006). *Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, dan Kemiskinan : Sebuah Studi Empiris.* Diakses melalui  
<http://www.petra.ac.id> pada 20 J
- Vidhandika Moeljarto. (1987). *Pemberdayaan (Empowerment),* dalam Onny S. Prijono dan Pranarka (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi.* Jakarta : CSIS. Hlm : 44-46.
- UN-HABITAT, (2003). *Quoted in Durrand-Lasserve 2006.* Hlm: 12
- Koran**  
Jawa Pos (Koran Harian).Mampu Lampui  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Diakses  
melalui <https://jawapos.com/mampu-lampau-pertumbuhan-ekonomi-nasional/> pada 3  
Januari 2018.
- Kompas (Koran Harian).“*Nawa Cita*” , 9 *Agenda Prioritas Jokowi – JK.* Diakses melalui  
(online)  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> pada 1  
Januari 2018.
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**  
Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 58 tahun 2016  
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan  
Keuangan Khusus Desa untuk Kegiatan  
Revitausasi Kawasan Pemukiman Kumuh  
Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2015-  
2019  
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya  
tahun 2015 – 2019  
Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Sidoarjo  
no. 188/452/0.1.3.2/2015 tentang penetapan  
lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Sidoarjo  
Undang-Undang No. 25 tahun 2004  
Undang-Undang No. 4 pasal 22 tahun 1992  
Wawancara di Desa Bligo dan Desa Bligo.